

SKRIPSI

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING

DI KABUPATEN ENREKANG

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-1

Departemen Ilmu Pemerintahan



Oleh

MUH ZHOHIRUL HAQ

E051211004

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan diajukan oleh:

MUH ZHOHIRUL HAQ

E051211004

Yang akan dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing



Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si
NIP. 196804112000121001

Mengetahui

**Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**



Dr. A. Lukman Irfan, S.I.P., M.Si
NIP. 197901062005011001



LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI
KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan diajukan oleh:

MUH ZHOHIRUL HAQ

E051211004

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, 13 November 2024

Menyetujui

Panitia Ujian

Ketua : Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si

Anggota : Rahmatullah, S.IP., M.Si

Anggota : Yusriah Amaliah, S.IP, M.Si

Pembimbing : Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si

()
()
()
()



PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Zhohirul Haq

NIM : E051211004

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING

DI KABUPATEN ENREKANG

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Muh Zhohirul Haq



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi alamin, segala puji dan syukur selalu diberikan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang dengan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya telah menciptakan kehidupan dan membimbing kaki-kaki hamba-Nya. Dia juga memberi tahu kita bahwa segala sesuatu dimulai dan berakhir dengan kehendak-Nya. Penulis menyampaikan salam dan shalawat yang tulus kepada Nabi Muhammad Saw. Dia adalah pemimpin yang membawa risalah kebenaran dan kebijaksanaan, dan dia harus menjadi suri teladan bagi semua orang.

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, dengan bantuan semua pihak termasuk dan bantuan ALLAH SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Enrekang".

Perjalanan panjang untuk menyusun skripsi ini penuh dengan kesulitan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati ingin menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada semua orang yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini tidak akan mungkin selesai tanpa cinta, dukungan moral, doa, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua. Zuhranis Dachrud, seorang ibu yang penuh cinta dan kasih sayang tanpa batas, dan Kadir Loga, seorang ayah yang tangguh dan murni dalam setiap pengorbanannya. Saya ingin



terima kasih atas cinta yang tidak berhenti yang telah menjadi tempat saya belajar tentang menjadi manusia. Semoga perjuangan

kalian di balas dengan kebahagiaan dan rasa syukur ini, serta doa-doa terus-menerus untuk keselamatan kalian di dunia dan akhirat, dapat disampaikan oleh penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua orang yang telah membantu perjalanan hidup penulis sebagai mahasiswa sarjana, terutama dalam menyusun skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Rektor Universitas Hasanuddin, bersama dengan wakil rektor dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan sarjana (S1) di Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, bersama dengan seluruh staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan sarjana (S1).
3. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si, Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan, yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, dan dukungan kepada mahasiswanya selama kuliah.
4. Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si, Pembimbing Akademik dan Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan, saran, dan motivasi kepada penulis sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si, dan Ibu Yusriah Amaliah, S.IP., M.Si, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat dalam proses penyusunan skripsi.



6. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Ibu Dr. Hj. Indar Arifini, M.Si, , Bapak Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si, Bapak Saharuddin, S.IP., M.Si, Bapak Muhammad Chaeoroel Ansar, S.IP., M.Sc, dan Ibu Yusriah Amaliah, S,IP., M.AP Afni Amiruddi S.IP, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama berkuliah maupun dalam mengikuti kegiatan non-akademik.
7. Bapak Sumardi, S.IP, sebagai Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi.
8. Seluruh aparatur lingkup pemerintahan Kabupaten Enrekang atau pun pihak swasta serta masyarakat Kabupaten Enrekang yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan memberikan informasi, data, dan seluruh keperluan penelitian penulis.
9. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar dari peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang diberikan.
10. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada partner in Crazy the Rudals atas pengalaman kuliah yang luar biasa.
11. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penulis yang



; dalam Kerjaan Duyung dan atas semua cerita yang mewarnai guruan tinggi saya. Saya sangat senang mengenal kalian semua.

12..Seluruh teman-teman angkatan 2021 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

13.Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua orang, terutama penulis dan para pembaca. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih mengandung kekeliruan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan tulus meminta maaf dan menerima kritik dan saran untuk membantu perbaikan di masa mendatang. Karya ini diharapkan memenuhi standar dan dapat dipahami secara menyeluruh oleh pembaca.

Makassar, 13 November 2024



Muh Zhohirul Haq




Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
dan Landasan Teori.....	18
aborative Governance	18



2.1.2 Teori Collaborative Governance	19
2.2. Proses Collaborative Governance.....	24
2.2.1 Dinamika Kolaborasi	25
2.2.2 Tindakan-tindakan Kolaborasi	30
2.2.3 Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi	31
2.3 Stunting.....	32
2.4 Penanganan Stunting dalam Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	38
2.4.1 Stunting dalam SK Bupati Enrekang No 141/KEP/III/2022	39
2.4.2 Stunting dalam PERBUP Enrekang No 56 Tahun 2023	41
2.5 Penelitian Terdahulu	42
2.6 Kerangka Berpikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan & Jenis Penelitian.....	48
3.2 Fokus Penelitian.....	48
3.3.Lokasi Penelitian	55
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data	57
3.6 Teknik Analisis Data.....	58
3.7 Keabsahan Data	59
	61
- PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
- an Umum.....	61

4.1.1 Profil Kabupaten Enrekang	61
4.1.2 Profil Demografi Kabupaten Enrekang.....	63
4.1.3 Profil Pemerintah Kabupaten Enrekang.....	65
4.1.4 Lokasi Kantor Pemerintah Kabupaten Enrekang	66
4.1.5 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Enrekang	66
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	67
4.2.1 Dinamika Kolaborasi dalam Penanganan Stunting di Enrekang	67
4.2.1.1 Prinsip Bersama dalam Intervensi Sensitif dan Spesifik	67
4.2.1.2 Motivasi Bersama dalam Intervensi Sensitif dan Spesifik	75
4.2.1.3 Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama dalam Intervensi Sensitif dan Spesifik	81
4.2.1.4 Analisis Peneliti terhadap Dinamika Kolaborasi dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Enrekang	88
4.2.2 Tindakan Kolaborasi dalam Penanganan Stunting di Enrekang	92
4.2.2.1 Tindakan Kolaborasi Intervensi Spesifik	92
4.2.2.2 Tindakan Kolaborasi Intervensi Sensitif	96
4.2.2.3 Program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting	101
4.2.2.4 Analisis Peneliti terhadap Tindakan Kolaborasi	103
4.2.3 Dampak dan Adaptasi.....	105
Dampak yang diharapkan dari Penanganan Stunting	106
Dampak yang tidak diharapkan dari Penanganan Stunting	108



4.2.3.3 Dampak yang tidak terduga dari Penanganan Stunting	109
4.2.3.4 Adaptasi dari Penanganan Stunting.....	111
4.2.3.5 Analisis Peneliti terhadap Dampak dan Adaptasi Kolaborasi.....	113
4.3 Matriks Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting	
Kabupaten Enrekang	115
4.3.1 Analisis Kesimpulan Peran Stakeholder dalam Penanganan Stunting	
Kabupaten Enrekang	115
4.3.2 Analisis Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting	
Kabupaten Enrekang	117
BAB V PENUTUP	120
5.1 Kesimpulan	120
5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN.....	129



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Angka Prevelensi Stunting di Sulawesi Selatan tahun 2021	4
Gambar 1.2 Angka Prevelensi Stunting di Sulawesi Selatan tahun 2024	5
Gambar 1.3 Data Prevensi Stunting 2019-2024.....	9
Gambar 1.4 Persentase Balita Stunting per 2023 dan target Penurunan.....	11
Gambar 2.1 Pola Collaboraitve Governance menurut Emerson dkk	25
Gambar 2.2 Stunting dalam RPJMD Kabupaten Enrekang.....	39
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Enrekang	62
Gambar 4.2 Lokakarya Mini oleh TPPS Enrekang	72
Gambar 4.3 Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten di Enrekang	73
Gambar 4.4 Penandatanganan MoU dengan Kemenag	80
Gambar 4.5 Pemberian Bantuan oleh Dinkes dan Disdalduk Enrekang	93
Gambar 4.6 Sosialisasi dan Pelyanan Keshatan BAZNAS Enrekang	94
Gambar 4.7 Pemberian Edukasi Pola asuh dan Perawatan Stunting	95
Gambar 4.8 Edukasi B2SA oleh Pemda Enrekang ke Sekolah.....	97
Gambar 4.9 Pemberian Bak Sampah oleh Bank Sulselbar Cab Enrekang	99
Gambar 4.10 Penyaluran bantuan oleh Bapak Bunda Asuh TPPS Enrekang	102



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	42
Tabel 3.1 Dimensi kerangka teoritis oleh Emerson dkk.....	49
Tabel 3.2 Intervensi Gizi Spesifik dan intervensi Gizi Sesnsitif Enrekang	54
Tabel 4.1 Luas Wilayah Efektif Menurut Kecamatan Di Kabupaten Enrekang .	63
Tabel 4.2 Pemetaan Anggaran Stutnting Provinsi Sulawesi Selatan 2023	86



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	125
Lampiran 2 SK Tim Percepatan Penurunan Stunting Enrekang.....	129
Lampiran 3 Lampiran 4 SK Bapak Bunda Asuh Peduli Stunting	142
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	148



ABSTRAK

Muh Zhohirul Haq, Nomor Induk Mahasiswa E051211004, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: **"COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG"**, dibawah bimbingan Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengevaluasi Collaborative Governance yang dilaksanakan pemerintah, swasta serta masyarakat dalam penanganan Stunting di Kabupaten Enrekang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjabarkan dan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, obeservasi, dokumentasi dan studi Pustaka dengan metode purposive sampling terkait penyelenggaraan Collaborative Governance Pemerintah Kabupaten Enrekang. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Collaborative Governance oleh Emerson diketahui secara garis besar bahwa para stakeholder yang terlibat telah melaksanakan Dinamika, Tindakan serta Dampak dan Adaptasi Kolaborasi dengan baik. Namun pada beberapa komponen yang ada didalamnya masih perlu untuk dievaluasi dan dimaksiamalkan. Diantaranya pada Dinamika Kolaborasi yang masih terdapat kendala berupa deliberasi yang belum berjalan maksimal dan juga masih kurangnya sumber daya yang dimiliki. Hal ini tentu mempengaruhi pada Tindakan Kolaborasi yang mana membuat keterlibatan yang rendah dari beberapa aktor lainnya dan akhirnya juga berdampak pada kurang maksimalnya penurunan stunting. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya adaptasi berupa Kolaborasi yang lebih merata agar program penanggulangan stunting berhasil dan meningkatkan partisipasi aktif semua pihak.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Stunting, Enrekang



ABSTRACT

Muh Zhohirul Haq, Student Identification Number E051211004, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis with the title: “**COLLABORATIVE GOVERNANCE IN STUNTING HANDLING IN ENREKANG DISTRICT**”, under the guidance of Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si. This study aims to determine and evaluate Collaborative Governance implemented by the government, private sector and the community in handling stunting in Enrekang Regency.

The research method used is a descriptive qualitative approach to describe and analyze data obtained through interviews, observations, documentation and literature studies with a purposive sampling method related to the implementation of Collaborative Governance of the Enrekang Regency Government. The data analysis technique used is qualitative analysis through data reduction, data presentation and data verification.

The results showed that based on Collaborative Governance by Emerson, it is known that the stakeholders involved have implemented the Dynamics, Actions and Impact and Adaptation of Collaboration well. However, some of the components in it still need to be evaluated and maximized. Among them are the Dynamics of Collaboration, where there are still obstacles in the form of deliberation that has not run optimally and parties who do not know about the existing procedures and agreements that have implications for decisions that are not taken together. And also there is still a lack of resources owned. This certainly affects the Collaborative Action which makes low involvement from several other actors and ultimately also has an impact on the lack of maximum stunting reduction. This shows that adaptation is needed in the form of more equitable collaboration so that the stunting prevention program is successful and increases the active participation of all parties.

Keywords: Collaborative Governance, Stunting, Enrekang



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan salah-satu bentuk kekurangan gizi yang dialami oleh masyarakat di zaman sekarang dan perlu penanganan secara cepat. Hal ini dikarenakan masalah ini dapat mempengaruhi perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Selain itu, alasan mengapa masalah stunting penting diatasi karena potensi dari sumber daya manusia yang akan terganggu karena memiliki hubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian bayi. Faktanya, terdapat 149,2 juta atau sekitar 22,0% balita mengalami stunting di seluruh dunia pada tahun 2020. Angka ini mengalami penurunan dalam beberapa tahun setelahnya namun nomor balita yang mengalami stunting belum mencapai target World Health Assembly, yaitu sekitar 40% pada tahun 2025. Jika dilihat separuh dari balita yang mengalami stunting pada tahun 2020 berasal dari Asia dan dengan angka sekitar 53% balita. Dari 135,9 Miliar balita stunting di Asia, lebih dari 11% kasus terjadi di Asia Tenggara (WHO,2021).¹

Generasi yang berkembang secara optimal atau dalam hal ini generasi yang tidak mengalami stunting, memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi sehingga menjamin daya saing yang unggul di bidang pembangunan dan perekonomian. Selain itu, pertumbuhan yang optimal dapat mengurangi beban

t degeneratif akibat stres pada Rahim. Penyakit degeneratif seperti



Rosad, 'Gambaran Pengetahuan Gizi Dan Pola Asuh Ibu Terhadap Kejadian Stunting', *osad*, 5.3 (2020), pp. 248–53.

diabetes, darah tinggi, jantung, dan ginjal tentu membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi. Oleh karena itu, terdapat harapan bahwa pencegahan stunting dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa membebani biaya pengobatan penyakit degeneratif (Aryastami, 2017). Dikutip dari rsudblora.blorakab.go.id

Stunting sendiri memiliki beberapa faktor penyebab, antara lain:

- Pola Asuh Kurang Efektif
- Kurang Gizi dalam Waktu Lama
- Pola Makan
- Tidak Melakukan Perawatan Pasca Melahirkan
- Gangguan Mental dan Hipertensi Pada Ibu
- Sakit Infeksi yang Berulang
- Faktor Sanitasi

Jika masalah stunting sampai pada tahap ikronis, maka akan mempengaruhi fungsi kognitif, yaitu tingkat kecerdasan yang rendah, dan tentu berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Masalah stunting memiliki dampak yang cukup serius, antara lain, dalam jangka pendek, berhubungan dengan kesakitan dan kematian bayi, sedangkan untuk jangka menengah, berhubungan dengan rendahnya kecerdasan dan rendahnya kemampuan kognitif dan dalam jangka panjang, berhubungan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penyakit degeneratif pada usia dewasa. Kekurangan gizi pada anak usia dini dapat membahayakan perkembangan fisik dan mental mereka, meningkatkan risiko penyakit, dan bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Balita yang mengalami stunting juga berisiko terkena penyakit degeneratif, memiliki produktivitas yang rendah, dan menghadapi keterbatasan



intelektual di masa depan. Stunting merupakan masalah serius karena dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.²

Di Indonesia sendiri Prevalensi stunting masih sangat tinggi. Menurut Global Nutrition Report, prevalensi stunting di Indonesia menempati urutan 108 dari 132 negara partisipan. Menurut data pada Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Kesehatan tahun 2020, Target prevalensi stunting pada Balita untuk tahun 2020 adalah 24,1% (5.543.000 Balita), sementara laporan pada Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM SIGIZI) per tanggal 20 Januari 2021, dari 34 provinsi menunjukkan bahwa dari 11.499.041 balita yang diukur status gizinya berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U) terdapat 1.325.298 balita dengan TB/U <-2 SD atau dapat dikatakan 11,6% balita mengalami stunting³

Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masalah stunting, diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini berisi tentang percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan. Ironisnya, di hilir (pelaksana program dan masyarakat), isu stunting masih terdengar asing. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang stunting, baik definisi, penyebab, dampak, maupun upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Hal ini sangat bertolak



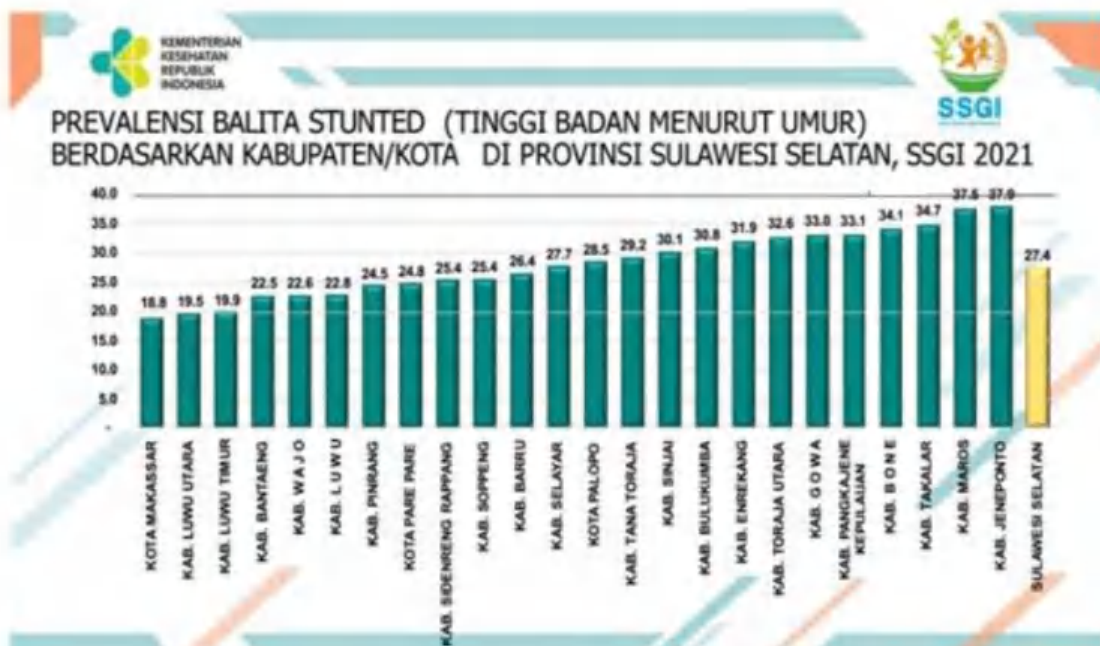
MELELO, 'COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN UPATEN TEMANGGUNG', 5 (2023), pp. 1–14

ojs.nlm.nih.gov/books/NBK558907/.

ati, Rahmania Ambarika, and Dedi Saifulah, 'Pengetahuan Dan Sikap Ibu Balita Sadar Stunting', *Journal Of Health Science Community*, 3.1 (2022), pp. 26–33
<http://www.jhsc.com/index.php/jhsc>.

belakang dengan keadaan di atas dimana pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dan mengucurkan anggaran yang tidak sedikit untuk program-program penanggulangan stunting yang seharusnya, tentu saja, dapat menjangkau dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri termasuk tiga provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi, yaitu 35,7 persen, berada di atas Sulawesi Tenggara (28,7 persen), Sulawesi Utara (25,5 persen) dan Sulawesi Tenggara (32,3 persen) ⁴. Total balita 0-59 bulan yang diukur di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 318.894 orang dengan rata-rata balita di setiap kabupaten/kota.

Gambar 1.1 Angka Prevelensi Stunting di Sulawesi Selatan tahun 2021



Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Sedangkan total kasus balita stunting di Provinsi Sulawesi Selatan adalah an rata-rata 2.226, median 2.414, dan standar deviasi 1.090,60.



and others, 'Disrupsi Modal Sosial Stunting Di Sulawesi Selatan , Indonesia (Studi Kasus 10 HPK Di Kabupaten Bone Dan Enrekang)', 2021, pp. 352–60.

Berdasarkan data SSGI tahun 2021, tingkat stunting di Kabupaten Enrekang menjadi sebesar 31,9%, menempati urutan ke-8 di antara semua provinsi di Sulawesi Selatan.

Gambar 1.2 Angka Prevelensi Stunting di Sulawesi Selatan tahun 2024



Sumber: inziting.sulselprov.go.id

Di tingkat kabupaten, Berdasarkan hasil dari Pemantauan Status Gizi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, menyatakan bahwa prevalensi Stunting juga pernah mencapai lebih dari 23,7% yaitu sekitar 4206 balita⁵. Tidak beda jauh dengan data tersebut menurut data dari dinas kesehatan (Dinkes) Enrekang tentang balita yang mengalami stunting pada tahun 2021 di kabupaten Enrekang, 3.277 balita, atau 22,8% dari 15.275 balita yang ada di daerah Enrekang. Data ini diperoleh dari Pemantauan Status Gizi tahun 2021 yang seluruh pusat kesehatan di Kabupaten Enrekang.⁶



na Sukarna, and Nurhilaliyah Nurhilaliyah, 'Pemetaan Risiko Relatif Kasus Stunting Di Selatan', *Sainsmat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam*, 11.1 (2022), p. 11, smat111325202022.

Batara, A. S., Nurlinda, 'Efektivitas Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program stunting Di Kabupaten Enrekang', *Journal of Muslim Community Health (JMCH)* 2023,

➤ Kebijakan Penanggulangan Stunting

Dilihat dari realita yang ada saat ini, perhatian pemerintah dalam mengatasi masalah stunting sudah cukup memadai, yang dibuktikan dengan adanya berbagai kebijakan untuk menangani masalah stunting. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang pilar stunting, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Dan di Tingkat daerah ada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 19 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Di Kabupaten Enrekang sendiri beberapa Tindakan dalam menangani stunting ini sudah dilakukan diantaranya:

- Pemerintah Kabupaten Enrekang sendiri telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Bupati Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) Program ini bertujuan untuk mengurangi stunting dengan berfokus pada ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, serta intervensi yang ditujukan untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Program GEMPITA melibatkan berbagai sektor untuk mendukung dan mendorong masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri. Strategi ini mencakup optimalisasi sumber daya, seperti pemahaman tentang pola



17 <<https://doi.org/10.52103/jmch.v4i1.1188>JournalHomepage:<https://pasca-1p/jmch>>.

makan, pengasuhan anak, dan sanitasi, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat.

- Pembentukan Forum Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Keputusan Bupati No.590/kep/XI/2017 adalah Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendukung gaya hidup sehat, seperti berolahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari, mengonsumsi buah dan sayur secara teratur, menghindari kebiasaan merokok dan minum alkohol, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan fasilitas sanitasi yang layak. Program ini melibatkan berbagai sektor, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat, sekolah, dan lembaga pendidikan, serta dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk mendukung dan mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat.
- Keputusan Camat Maiwa No. 018/KEP/KM/I/2019 dan Keputusan Kepala Puskesmas Maiwa No.004/PKM.M/TU.I/I/2019 terkait pembentukan Komunitas Ibu CERDAS (Cekaran Empati Religius Disiplin Antusias Sadar gizi) Cegah Stunting
- Nota Kesepahaman atau MoU No.101/PKM.M/MOU/VIII/2019 tentang Komunitas Ibu CERDAS Cegah Stunting (Cekaran Empati Religius Disiplin Antusias Sadar gizi) Untuk mendukung program percepatan penurunan stunting melalui Komunitas Ibu CERDAS Cegah Stunting, Puskesmas Maiwa



apfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Makassar. Kerja sama ini akan
an pelatihan dan pendampingan kepada wanita usia subur (WUS)

dan pasangan usia subur (PUS) di Desa Pariwang, Kecamatan Maiwa. Sementara PT Japfa bertanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan, Puskesmas bertanggung jawab atas dukungan teknis.

- Nota Kesepahaman atau MoU No.09/078/MOU/VII/2019/T.PEM tentang Pendistribusian Tablet Tambah Darah untuk Remaja Putri Sekolah Kabupaten Enrekang.
- Nota Kesepahaman atau MoU No.10/078/MOU/VII/2019/T.PEM tentang Pelayanan Darah Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu
- Nota Kesepahaman atau MoU No.11/078/MOU/VII/2019/T.PEM tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu.
- Nota Kesepahaman atau MoU No.12/078/MOU/VII/2019/T.PEM tentang Penyelenggaran Gerakan Pekan Sayang Ibu Anak Kabupaten Enrekang yang berfokus pada pendidikan publik tentang pentingnya menjaga dan melindungi ibu dan anak.
- Nota Kesepahaman atau MoU No.16/078/MOU/VII/2019/T.PEM tentang Program PEPAYA (Pemantauan Perumbuhan di Posyandu).
- Nota Kesepahaman atau MoU No.052/PKM.M/MOU/I/2019 tentang Komunitas Ibu CERDAS Cegah Stunting (Cekaran Empati Religius Disiplin Antusias Sadar gizi) Untuk mendukung program percepatan penurunan stunting melalui Komunitas Ibu CERDAS Cegah Stunting
- Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 29 Tahun 2020 tentang

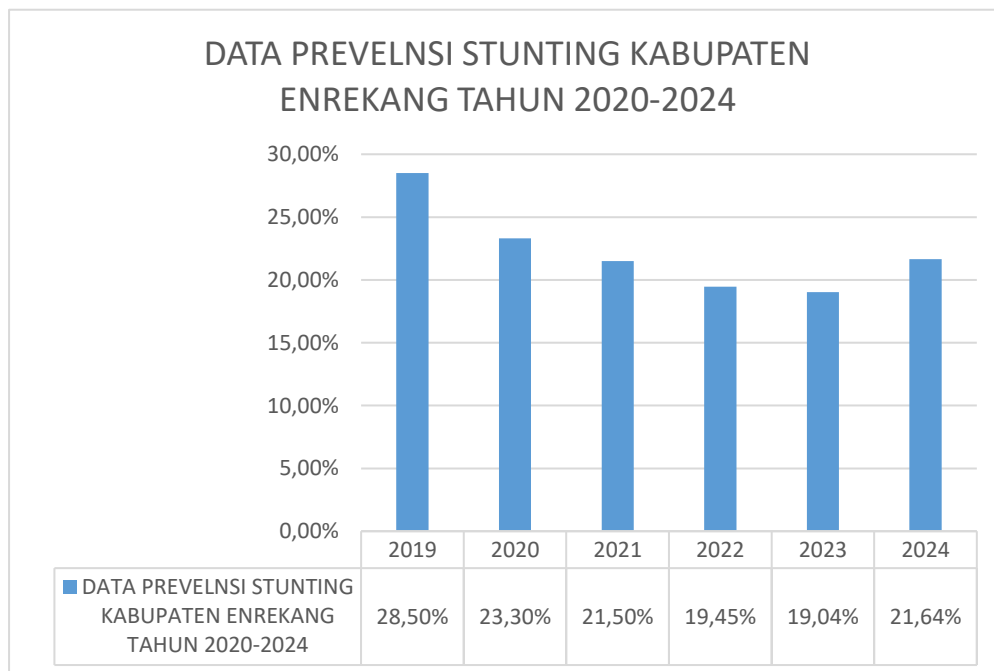


sa dalam pencegahan stunting dan Peraturan Daerah Nomor 44
21 tentang Penurunan Stunting Berbasis Pencegahan dari Hulu

adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah Enrekang untuk mengurangi stunting.

- Kesepakatan Bersama LoA No.010/TPPS/III/2023 dan no B-1034/KK.21.0516/BA.00/4/2023 tentang Penguatan Pendampingan bagi Remaja dan Calon Pengantin dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting
- Kesepakatan Bersama LoA No.006/TPPS/III/2023 dan no 0159/KB/III.3.A.U/F/2023 tentang Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting.

Gambar 1.3 Data Prevensi Stunting 2019-2024



Sumber: Data Sekunder setelah diolah



Dengan adanya beberapa kebijakan ini, secara data prevalensi stunting terus mengalami penurunan setiap tahunnya mulai dari 2019-2023 walaupun pada 2024 kembali mengalami kenaikan.

➤ **Permasalahan Stunting di Kabupaten Enrekang**

Meski dari tahun ke tahun terjadi penurunan angka stunting di Kabupaten Enrekang, hal ini masih belum mencapai target yang diinginkan. Dikutip dari Portal Berita Enrekang (2023), Menurut Muslimin Bando selaku Bupati Enrekang angka prevalensi Stunting belum mencapai target yang ingin dicapai yaitu di angka 14% di tahun 2024. Hal yang sama juga diungkapkan Dr. Sri Siswaty Zaenal, selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Enrekang dalam wawancanya bersama Detik Sulsel. Beliau mengatakan meski dari tahun ke tahun Enrekang terus mengalami penurunan dalam angka stunting. Namun, hal ini terus diwaspadai mengingat angka tersebut tergolong masih tinggi. Bahkan menurut PJ Sekda Andi Sappada saat melakukan Koordinasi dengan TPPS Enrekang mengatakan bahwa kedepannya dia berharap Enrekang bisa mencapai zero new stunting atau nol kasus stunting baru.

Untuk menangani stunting, perlu ada upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan, terutama dalam hal mengidentifikasi, memaksimalkan, dan menerapkan metode penanganan yang efektif dan efisien. Evaluasi berkala sangat penting untuk menentukan keberhasilan program dan masalah yang perlu diperbaiki. Selain itu, efek positif dari setiap upaya dapat ditingkatkan dengan



an sumber daya dan potensi yang tersedia, baik dari sumber daya masyarakat, maupun swasta. Program penanganan stunting di

Indonesia dapat mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan untuk kesejahteraan anak-anak dan keluarga di Indonesia jika menggunakan pendekatan yang tepat sasaran dan efektif.

Gambar 1.4 Persentase Balita Stunting per 2023 dan target Penurunan



Data Olahan Bangsa Kemendagri

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa dalam penanganan stunting ini masih menjadi permasalahan di antaranya:

- Berdasarkan penelitian A.Riyadh dkk dalam Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang Untuk mengatasi kendala dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan dan organisasi perangkat daerah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati tersebut.⁷ Namun, memberikan tanggung jawab penuh hanya kepada pemerintah, dalam hal ini dinas kesehatan, tanpa adanya kerja sama dari pihak lain tidak hanya memperlambat implementasi kebijakan atau penanganan masalah stunting, tetapi dapat memperburuk kondisi stunting karena lambatnya penanganan.
- Menurut Mega dkk, dalam penelitiannya terkait implementasi kebijakan stunting di Kabupaten Enrekang bahwa Organisasi dan struktur birokrasi juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pencegahan stunting. Birokrasi yang efisien memungkinkan koordinasi yang baik antara unit-unit di Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berjalan dengan baik. Namun, birokrasi yang rumit atau lambat dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.⁸



tara, A. S., Nurlinda.
ga Syahrudin, 2Suharni A. Fachrin, 'Analisis Implementasi Kebijakan Program
stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang', 19.5 (2016), pp. 1–23.

- Penelitian sebelumnya mengenai stunting di Kabupaten Enrekang, dalam Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes, selain dari sisi pembiayaan yang masih kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh tataran kebijakan, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dan program mengenai pengentasan stunting dan percepatan penanganannya dan disertai dengan anggaran yang cukup besar. Namun di satu sisi, di level masyarakat upaya percepatan pencegahan stunting yang digadang-gadang tersebut belum dirasakan manfaatnya⁹.
- Menurut Nur Abri (2022) dalam Journal of Health and Nutrition Research. Pengetahuan ibu terkait gizi anak memiliki keterkaitan dengan stunting yang terjadi. Namun, kenyataannya hal ini masih kurang. Pemerintah harus berkontribusi untuk mendorong edukasi untuk menghentikan stunting dengan mempromosikan kesehatan, memasang poster tentang stunting di pusat keramaian, dan menyebarkan surat kabar tentang stunting secara terus menerus. Salah satu cara untuk mengatasi malnutrisi kronis pada anak-anak di pedesaan Enrekang adalah dengan meningkatkan kesadaran ibu tentang kesehatan dan gizi.¹⁰
- Menurut Nur Amaliyah, dkk, Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang menghadapi kendala saat menerapkan Kebijakan Stunting. Salah satunya adalah masyarakat yang kurang informasi. Beberapa hambatan dan kendala dalam pencegahan dan penanggulangan stunting ini juga termasuk keterlibatan



s, Haeruddin, and Nurul Susanti, 'Pola Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam
 ing Di Wilayah Kerja Puskesmas Maiwa Sebagai Lokasi Khusus Stunting Kabupaten
Penelitian Kesehatan Suara Forikes, 13 (2022), pp. 180–85.
 fication of Socio-Demographic Faktors with the Incidence of Stunting in Elementary
 Rural Enrekang', *Journal of Health and Nutrition Research*, 1.2 (2022), pp. 88–94,
 esearch.v1i1.20.

organisasi perangkat daerah dan stakeholder, yang diatur dalam Peraturan Bupati.¹¹

Atas dasar itulah Pemberantasan stunting merupakan topik penting, bahkan pada level internasional stunting merupakan bagian dari strategi pembangunan global PBB yang visioner, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dari 17 tujuan yang termasuk dalam SDGs, salah satunya adalah tujuan nomor dua, yaitu Zero Hunger, yang berfokus pada penghapusan kelaparan. Tujuan Zero Hunger ini berperan penting dalam mengurangi stunting¹². Maka dari itu, tentu saja dibutuhkan kolaborasi penanggulangan yang melibatkan semua pihak, atau dengan kata lain, tata kelola yang kolaboratif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah. Menurut Rahayu dkk, salah satu strategi yang dapat digunakan dalam menjawab tantangan tersebut, yaitu dengan menerapkan multi tata kelola, dimana semua aktor dalam masyarakat harus dilibatkan dalam proses implementasi¹³. Permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan hanya dari sektor kesehatan saja, namun membutuhkan keterlibatan dari sektor lain. Candriasih dan rekan-rekannya (2021) menyatakan bahwa masalah stunting disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, sehingga membutuhkan penanganan secara multisektoral melalui kerja sama yang kolaboratif.¹⁴

¹¹ Riyadh, N. A., Batara, A. S., Nurlinda.

¹² Sri Rahayu, Abdul Mahsyar, and Fatmawati, 'Collaborative Governance in Overcoming Stunting in', *International Journal of Science and Society*, 6.2 (2024), pp. 134–45, doi:10.24127/ijss.v6i2.11118.



Ar, and Fatmawati.

Sabilla and R Slamet Santoso, 'Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Ung Mas', Kota Semarang', *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13.1

Menurut Ansell dan Gash (2007:546) collaborative governance didefinisikan sebagai serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pembuatan kebijakan yang formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset. Munculnya collaborative governance dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antarlembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi. Kolaboratif juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi. Maka dari itu, collaborative governance dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan dimana berbagai pihak muncul untuk mendorong kerja sama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik atau dalam hal ini stunting.

Collaborative Governance muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi atau lambatnya penanganan masalah stunting. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan tersebut



penelitian ini terutama dari segi collaborative governance baik itu faktor yang mempengaruhi serta pengaruh dari Collaborative Governace dalam Stunting yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Sebagai berikut::

1. Bagaimanakah Dinamika Kolaborasi dari Collaborative Governace dalam penanganan Stunting yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang?
2. Bagimanakah Tindakan-tindakan Kolaborasi dari Collaborative Governace dalam penanganan Stunting di Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimanakah Dampak dan Adaptasi Kolaborasi dari Collaborative Governace dalam penanganan Stunting di Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan di dapat dalam penelitian ini adalah. Sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dinamika Kolaborasi dari Collaborative Governace dalam penanganan Stunting yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui Tindakan-tindakan Kolaborasi dari Collaborative Governace dalam penanganan Stunting di Kabupaten Enrekang.
3. Untuk mengetahui Dampak dan Adaptasi Kolaborasi dari collaborative Governace dalam penanganan Stunting di Kabupaten Enrekang.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca, baik itu dari pemerintah, masyarakat maupun elemen masyarakat lainnya dalam

bekerja sama untuk menangani permasalahan Stunting yang ada terkhusus di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu atau menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dan menambah teori-teori baru untuk penelitian yang sejenis.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penelitian selanjutnya dan dapat mengadaptasinya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Landasan Teori

2.1.1 Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan suatu tatanan pemerintahan yang di dalamnya terdapat keterlibatan semua pihak antara pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta yang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egaliterianisme (kesetaraan) dan demokrasi. Dengan kata lain, hal ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sebagai langkah untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik dan penyediaan pelayanan public. Menurut Ansell dan Gash (2007), Collaborative governance adalah proses yang menginisiasi adanya kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan formal, baik itu melalui konsensus maupun negosiasi. Dengan kata lain, dalam pandangan ini, keterlibatan pemangku kepentingan diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai dan kepentingan publik dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas keputusan publik, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mencegah konflik.¹⁵

Menurut Ansell dan Gash (2007:543) menjelaskan bahwa collaborative governance merupakan strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat berbagai pengambil kebijakan berkumpul dalam satu forum yang sama



borative Governance Dalam Upaya Pencapaian Target Sanitasi Layak Di Kota Padang',
Nasional Pelestarian Lingkungan Hidup, November, 2019, pp. 380–90.

untuk menciptakan konsensus bersama. Ahli lain mendefinisikan serupa bahwa proses kolaboratif adalah interaksi yang bersifat siklus atau berulang yang terdiri dari keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (Emerson et al., 2011: 10).

Selain itu, Emerson dkk menambahkan mendefinisikan collaborative governance sebagai suatu proses dan struktur pengelolaan dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai tingkatan, baik pada level pemerintah dan atau lembaga publik, lembaga swasta maupun masyarakat madani dalam rangka mencapai tujuan-tujuan publik yang tidak dapat dicapai jika dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Robertson dan Choi (2010) mendefinisikan collaborative governance sebagai proses yang egalitarian dan kolektif di mana setiap peserta memiliki otoritas untuk membuat keputusan. keputusan yang dibuat, dan semua pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk merenungkan keinginan mereka dalam proses itu.¹⁶

2.1.2 Teori Collaborative Governance

Kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam praktik pemerintahan saat ini. Collaborative governance muncul dan berkembang secara adaptif sebagai respon terhadap adanya kompleksitas dan konflik atau isu-isu yang menuntut nilai-nilai demokratis.



Varsono, H., & Rachim, 'Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi
Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik, 2020, p. 161.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Junaidi (2015) yang mengatakan bahwa pemerintahan kerja sama tidak muncul secara kebetulan. Sebaliknya, muncul karena inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong proses kerja sama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah masyarakat.¹⁷ Adapun Beberapa teori dari Collaborative Governance yang dikemukakan oleh beberapa Ahli antara lain:

a. Weber, Lovrich, dan Gaffney

Menurut Weber, Lovrich, dan Gaffney (2005), kolaborasi yang efektif bergantung pada integrasi berbagai fungsi, seperti keterlibatan masyarakat, kebijakan, dan birokrasi. Kolaborasi dibagi menjadi tiga dimensi utama. Dalam hierarki atas-bawah, dimensi vertikal menunjukkan hubungan antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, sedangkan dimensi horizontal menunjukkan hubungan yang setara antar organisasi. Namun, dimensi kemitraan merupakan gabungan dari dua dimensi sebelumnya, yang menghasilkan hubungan kerja yang efektif, pembangunan komunitas, dan pemanfaatan proses interaktif.

b. Ann Marie Thomson dan James L. Perry

Ratner (2012) menguraikan perspektif yang berbeda tentang Collaborative Governance dan menekankan tiga tahap utama kolaborasi:

1. Identifikasi Hambatan dan Peluang: Pemangku kepentingan mendengarkan untuk mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi



ngkotow, Nadia F, Welly Waworundeng, 'Model Collaborative Governance Antara h Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pantai Duta Di Kabupaten Probolinggo', *nie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, pp. 2013–15.

selama proses kerja sama. Setiap pihak memberikan penjelasan tentang masalah yang dihadapi, sementara pihak lain mendengarkan dan mempertimbangkan peluang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setiap pemangku kepentingan memiliki hak yang sama untuk menentukan kebijakan dengan tujuan mencapai pencapaian yang menguntungkan bagi semua pihak. Fase ini menekankan pentingnya mendengarkan dan memahami masalah dan peluang yang muncul.

2. Strategi Debat untuk Mempengaruhi: Pada tahap ini, pemangku kepentingan berbicara tentang tantangan yang ditemui pada tahap pertama. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Para pemangku kepentingan juga membahas pihak-pihak yang dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah.
3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi: Setelah tahap mendengarkan dan memilih strategi yang paling cocok, pemangku kepentingan mulai merencanakan tindakan untuk menerapkan strategi tersebut. Pada tahap ini, mereka mengidentifikasi ukuran kinerja dan tindakan apa yang diperlukan untuk menjaga kolaborasi berlangsung dalam jangka panjang.

c. Chris Ansell dan Alison Gash

Ansell dan Gash berpendapat bahwa dalam kolaborasi terdapat komponen-komponen yang membentuk sebuah siklus yang saling

ni satu sama lain (Ansell dan Gash, 2007).



1. Dialog antar-muka sebagai salah satu bentuk komunikasi menjadi penting dalam kolaborasi karena melekat dalam proses pembentukan konsensus. Komunikasi langsung (tatap muka) merupakan upaya untuk mengurangi stereotipe (yaitu persepsi seorang aktor yang melihat sisi buruk dari aktor lain).
2. Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena dalam setiap kolaborasi membutuhkan komunikasi yang intensif dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dari munculnya konflik masa lalu yang terlahir kembali yaitu antagonisme prasejarah.
3. Komitmen terhadap proses merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Bahkan, komitmen sangat terkait dengan motivasi nyata dari para aktor untuk berkolaborasi.
4. Pemahaman bersama adalah tentang memiliki pemahaman yang sama terhadap pencapaian tujuan bersama. Common mission, common purpose, common objectives, shared vision dapat diartikan sebagai pemahaman bersama. Hal ini berarti penyatuan pemikiran dan kesatuan tujuan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar aktor.
5. Dampak sementara dapat terjadi di tengah jalan, oleh karena itu ada kata "sementara" di dalamnya. Dampak sementara menghasilkan umpan balik. Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif yang disebut "small-wins" atau Roberts dan Bradley (1991) menyebutnya sebagai temporal



d. Debbie Roberts, Rene van Wyk, dan Nalesh Dhanpat

Dalam temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Roberts dkk. (2016) yang berjudul "Exploring Practices for Effective Collaboration", terdapat lima kunci kolaborasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan bersama - Visi bersama adalah kunci utama penggerak kolaborasi yang akan membuat para aktor tetap bersama dalam mengejar pencapaian tujuan tersebut.

2. Mutualitas: Mutualitas adalah ketika kedua belah pihak saling menyumbangkan sumber daya yang saling menguntungkan, misalnya dalam pertukaran informasi. Kesamaan misi, budaya, dan komitmen terhadap tujuan kolaborasi akan membantu memfasilitasi pertukaran sumber daya.

3. Lingkungan yang Memungkinkan Lingkungan Kolaboratif terdiri dari lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan pemimpin kolaborasi. Lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja para pelaku dalam menjalankan kolaborasi. Kepemimpinan berperan penting dalam membangun dan mempertahankan lingkungan kolaboratif dengan menghubungkan keterampilan dan pengetahuan para aktor (Fairuza, 2017).

4) Kepercayaan dianggap sebagai salah satu faktor yang mendasari keberhasilan kolaborasi. Kepercayaan didasarkan pada keyakinan bahwa para pelaku akan jujur dalam perjanjian dan mematuhi komitmen mereka, dan tidak akan mengeksploitasi pihak lain. Kontrol formal yang berlebihan dapat

akan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan di antara para pelaku karena kontrol



dianggap menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan dan karakter para pelaku (Fairuza, 2017). 38

5) Specific Personal Characteristics (Karakteristik pribadi tertentu) Dalam sebuah kolaborasi, para aktor harus terbuka dan dapat memahami motif dan kepentingan aktor lain. Pemahaman karakteristik aktor yang berkolaborasi dapat menumbuhkan kompromi sebagai konsekuensi pengambilan keputusan bersama dimana terdapat kepentingan aktor yang tidak terjawab dalam keputusan.

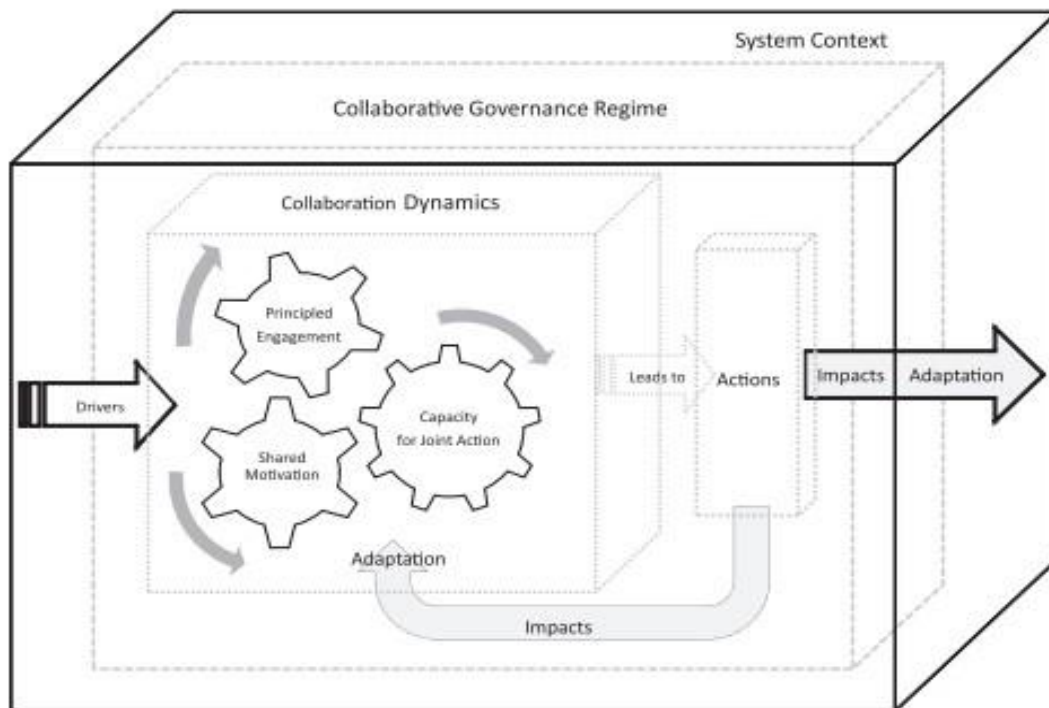
2.2. Proses Collaborative Governance

Dalam menentukan komponen kolaborasi sebagai alat analisis dalam penelitian ini, peneliti memilih teori ahli Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012), karena peneliti melihat adanya integrasi komponen kolaborasi yang tepat digunakan dalam menjawab permasalahan. Teori collaborative governance regime menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi bersifat dinamis dan siklikal, dengan menghasilkan aksi dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara.

Penelitian ini menggunakan berbagai komponen yang terdapat dalam CGR untuk mengungkap fenomena kolaborasi. Berbagai komponen yang membentuk proses kolaborasi tersebut antara lain 1) Dinamika kolaborasi, 2) Tindakan kolaborasi, dan 3) Dampak sementara dan adaptasi sementara dari proses kolaborasi.



Gambar 2.1 Pola Collaborative Governance menurut Emerson dkk



Sumber : Collaborative Governance dalam Persepective Administrasi Publik

2.2.1 Dinamika Kolaborasi

Di dalam proses kolaborasi, dinamika kolaborasi adalah bagian yang paling penting. Pengungkapan seberapa baik pelaksanaan kolaborasi terdapat pada dinamika, yang Ada penggerak prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama.

➤ ***Pergerakan prinsip bersama***

Emerson dan Nabatchi (2015) mendefinisikan keterlibatan berprinsip sebagai komunikasi yang terbuka dan inklusif yang berlangsung dari waktu ke waktu, yang terdiri dari proses dasar: Pengungkapan, Definisi, Deliberasi, dan



Melalui proses tersebut maka kolaborasi dapat berjalan dan dapat

mendorong motivasi dan aksi bersama untuk mencapai goal (tujuan).¹⁸ Beberapa hal seperti dialog tatap-muka, atau melalui perantara teknologi adalah cara menggerakkan prinsip bersama. Di dalamnya ada penjelasan ulang tujuan bersama, pengembangan, dan pembentukan prinsip-prinsip bersama yang sering diungkap dalam berbagai sudut pandang aktor, oleh karena itu, penyatuan prinsip merupakan inti dari hal ini. Di dalam penggerakan prinsip bersama, terdapat beberapa komponen sebagai berikut:

- Proses mengungkap kepentingan, nilai-nilai aktor, serta upaya konstruksi kepentingan bersama. Pengungkapan dapat dianalisis dari mengapa aktor tersebut bergabung ke dalam kolaborasi.
- Definisi yaitu tahap untuk mendefinisikan segala bentuk problem atau apa yang dimiliki dan dilakukan oleh pihak yang terlibat atau dengan kata lain bisa mengkalsifikasi ataupun menyesuaikan terkait tugas maupun harapan yang dimiliki.
- Deliberasi terbentuk dengan adanya diskusi bersama, keterbukaan berpendapat, menyatakan ketidaksetujuan, diskresi, sehingga membentuk “kualitas deliberasi”. Deliberasi pada kolaborasi telah terbentuk dengan adanya diskusi bersama. Seluruh aktor menyatakan bahwa diskusi yang berjalan terbuka, artinya terdapat dorongan untuk mengemukakan pendapat, terlihat dari presentasi masing-masing terhadap pencapaian kegiatan yang telah dilakukan.



Halaman and others, 'COLLABORATIVE GOVERNANCE PENANGANAN HIV AIDS DI ARTA Penyakit HIV AIDS Merupakan Data Direktorat Jenderal Pencegahan Dan ukan Bahwa Provinsi DKI Jakarta Merupakan Provinsi Dengan Jumlah Sumber : Dinas si DKI', 7 (2019), pp. 1–11.

- Determinasi merupakan serangkaian tindakan penetapan bersama akan tujuan berkolaborasi. Determinasi terdapat dua jenis, yaitu primer dan substantif. Determinasi primer lebih kepada pembuatan keputusan prosedural, (teknis kolaborasi, penetapan agenda, jadwal pertemuan, kelompok kerja). Sedangkan determinasi substantif lebih kepada pembentukan kesepakatan bersama, rekomendasi final tindakan kolaborasi ke depan.

➤ **Motivasi bersama (*shared motivation*)**

Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) menyatakan bahwa motivasi bersama merupakan suatu siklus yang saling memperkuat yang terdiri dari empat unsur yang saling menguntungkan, yaitu: rasa saling percaya, saling pengertian, legitimasi internal, dan komitmen. Penjelasannya sebagai berikut:

- Kepercayaan Bersama Membutuhkan usaha terus-menerus dari interaksi untuk mengetahui (mengetahui) satu sama lain dan menunjukkan bahwa seseorang dapat dipercaya. Selain itu, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi seperti hubungan saling tergantung, hubungan antar aktor di luar kolaborasi, pengalaman melakukan kolaborasi dengan aktor lain yaitu apakah dapat memberi kepercayaan atau malah memberi dampak negatif, budaya dari aktor, adanya hubungan individu pada antar aktor, atau terdapat peran lain dari individu tersebut sehingga mempengaruhi hubungan kepercayaan dengan aktor lain.



aman Bersama: Ini berarti bahwa setiap aktor dapat saling memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain. Pemahaman ini menuju pada kualitas interaksi interpersonal individu dan

organisasi. Pembentukan pemahaman bersama sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.

- Legitimasi Internal Merupakan adanya pengakuan berasal dari internal kolaborasi, yaitu bahwa aktor-aktor kolaborasi dapat dipercaya atau kredibel dalam menjalankan tugas dan perannya. Legitimasi internal, pemahaman bersama, dan kepercayaan bersama merupakan tiga elemen yang saling terkait erat satu sama lain dalam komponen motivasi bersama, sehingga untuk elemen selanjutnya, yaitu komitmen juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas tiga elemen ini.
- Komitmen, dalam proses kolaborasi, komitmen adalah mekanisme yang memungkinkan aktor dari berbagai latar belakang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam situasi seperti ini, komitmen dapat membuka peluang bagi aktor dari berbagai latar belakang untuk melintasi batas-batas tradisional yang membedakan mereka, baik itu sektoral, organisasi, atau yurisdiksi. Dalam proses ini, dapat ada berbagai tingkat kerja sama, seperti koordinasi informasi, pengembangan kebijakan bersama, dan pelaksanaan program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi lintas batas ini memungkinkan para pihak untuk lebih responsif terhadap perubahan dinamis di lingkungan luar dan lebih fleksibel dalam menemukan solusi inovatif yang sebelumnya tidak mungkin dicapai hanya dalam batas-batas organisasi atau sektor mereka masing-masing.



➤ **Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama**

Yang dimaksud adalah berbagai hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif, karena adanya kapasitas memadai dari aktor.

- Prosedur dan Kesepakatan Bersama Meliputi aturan-aturan umum, protokol- protokol kegiatan, dan aturan untuk membuat keputusan, yang semua itu dapat diwujudkan melalui kesepakatan informal dan formal. Namun, pada kolaborasi yang kompleks, dan berdurasi panjang, dibutuhkan lebih pada kesepakatan yang formal, seperti membentuk landasan hukum kolaborasi.
- Kepemimpinan (oleh pemimpin kolaborasi) Mempunyai peran mutlak dalam proses kolaborasi. Berbagai perannya adalah sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, menginisiasi pertemuan, representasi dari aktor dan kolaborasi secara keseluruhan, serta melakukan advokasi pada publik.
- Pengetahuan Merupakan segala informasi yang diperlukan oleh aktor untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Pengetahuan adalah informasi yang dipahami oleh Collaborative Governance sehingga berguna bagi mereka. Pengetahuan yang tidak didistribusikan dengan baik akan dapat membingungkan aktor kolaborasi, karena kerancuan informasi yang di dapat. Pada kolaborasi, pengetahuan sebagian besar



ibagikan pada pertemuan bersama. Di dalam pertemuan tersebut, at penyampaian hasil-hasil capaian dari masing-masing aktor,

kemudian diskusi dan pembuatan keputusan bersama yang merupakan pengetahuan penting dan dibutuhkan.

- Sumber daya Dalam konteks kolaborasi lintas batas, sumber daya mencakup berbagi dan memanfaatkan sumber daya yang sering kali terbatas, seperti dana, waktu, dan staf. Berkolaborasi ini memungkinkan setiap aktor untuk saling melengkapi dan memperkuat kapasitas masing-masing melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Pada akhirnya, berbagi dan memanfaatkan sumber daya yang langka ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas kolaborasi. Setiap pihak mendapat manfaat yang lebih besar dari kolaborasi ini daripada jika mereka bekerja sendiri, dan ini meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek secara keseluruhan.

2.2.2 Tindakan-tindakan Kolaborasi

Praktik kolaborasi tersebut dapat lahir dalam tindakan-tindakan yang sangat beragam, yang sebenarnya merupakan cerminan dinamika kolaborasi. Tindakan-tindakan secara kolaborasi pada dasarnya merupakan inti dari Collaborative Governance. Menurut Innes dan Booher, sebagaimana dikutip Emerson pada tahun 2012, tindakan-tindakan kolaborasi sebenarnya merupakan keluaran utama dari proses kolaborasi linier, yang terkadang dikaitkan dengan dampak. Hal ini pada dasarnya disebabkan karena proses dan output tidak dapat dipisahkan dari dampak itu sendiri. Menurut Huxam dalam Emerson, 2012, beberapa tindakan kolaborasi memiliki tujuan yang sangat luas seperti

langkah strategi dalam isu/bidang tertentu..



Namun banyak pula tindakan kolaborasi yang memiliki tujuan sempit seperti proyek pengumpulan dan analisis informasi spesifik. Tindakan kolaboratif ada yang bisa dilakukan secara sekaligus oleh seluruh pemangku kepentingan dan ada pula yang hanya bisa dilakukan oleh pemangku kepentingan tertentu dengan kapasitas masing-masing pemangku kepentingan. Apapun tindakan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan/ event atau diskusi dan sebagainya, dan baik buruknya dapat dilihat dari pembangunan dan pemahaman benar akan dinamika kolaborasi oleh para aktor dan individu kolaborasi. Kemudian, hasil daripada tindakan ini secara langsung membawa dampak sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang.

2.2.3 Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi

Dampak yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “small-wins” yaitu hasil-hasil positif yang terus berlangsung dan memberikan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Selain itu, dampak tidak terduga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kerja tim. Berbagai dampak tersebut menghasilkan umpan balik, yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing aktor yang ada.



si yang baik adalah yang sekiranya dapat dilakukan oleh seluruh organisasi, artinya tidak ada pengaruh kepentingan organisasi di atas sehingga menyebabkan terjadinya usaha mengambil manfaat

kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri. Adaptasi harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan utama untuk dirubah di dalam kolaborasi, sehingga hal tersebut dapat menjaga kemajuan kolaborasi. Adaptasi harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan utama untuk dirubah di dalam kolaborasi, sehingga hal tersebut dapat menjaga kemajuan kolaborasi ¹⁹

2.3 Stunting

Stunting, jika dikutip dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, adalah gangguan tumbuh kembang anak karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan di bawah standar dan ini juga yang ditetapkan oleh menteri kesehatan. Yang mana pengertian stunting menurut Kementerian Kesehatan adalah anak balita dengan gangguan pertumbuhan yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standar, sehingga berdampak baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Presiden Republik Indonesia Arahkan telah mempercepat penurunan stunting di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini menjadi fokus langsung Presiden karena meningkatnya jumlah kasus stunting di Indonesia. Stunting merupakan akibat dari kurangnya asupan zat gizi yang diperoleh balita sejak masa emas awal kehidupan, mulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) hingga usia dua tahun. Stunting akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua



mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya. Penyebab

sono, H., & Rachim.

utama stunting diantaranya, asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.²⁰

Stunting, atau gagal tumbuh, adalah kondisi yang dipicu oleh kekurangan gizi kronis dan ditandai dengan tinggi badan yang di bawah standar. Dengan demikian, stunting bukan hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah dampak jangka pendek dan panjang stunting:

Dampak Jangka Pendek Stunting

1. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak yang Terhambat: Stunting dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara signifikan, terutama dalam hal fisik dan kognitif.
2. Peningkatan Risiko Morbiditas dan Kematian: Anak-anak dengan stunting lebih rentan terhadap penyakit menular dan komplikasi kesehatan lainnya.
3. Perkembangan Kognitif, Motorik, dan Verbal yang Kurang Ideal: Stunting dapat berdampak pada perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak-anak, yang dapat menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam belajar dan



ers, 'Pencegahan Pernikahan Dini Dan Cegah Stunting Dengan Pola Asuh Anak Di
angnga Kabupaten Jeneponto', *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5
<http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JPF/article/view/2983>>.

berinteraksi.

4. Peningkatan Biaya Kesehatan: Stunting dapat meningkatkan biaya kesehatan karena anak-anak yang stunting lebih sering sakit dan membutuhkan lebih banyak perawatan.

Dampak Jangka Panjang Stunting

1. Risiko Penyakit Menular: Stunting yang tidak ditangani dapat meningkatkan risiko penyakit menular seperti hipertensi dan penyakit kronis lainnya saat dewasa.

2. Risiko Penyakit Kronis: Anak-anak yang stunting lebih berisiko mengalami obesitas dan penyakit kronis terkait nutrisi di masa dewasa seperti diabetes, hipertensi, dan dislipidemia.

3. Gangguan Kesehatan Reproduksi: Stunting dapat berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan dan laki-laki dengan meningkatkan risiko komplikasi obstetrik dan menurunkan kapasitas fisik yang terkait dengan kehamilan.

4. Penurunan Integritas (IQ) dan Prestasi Belajar: Stunting dapat menyebabkan penurunan integritas (IQ) dan prestasi belajar, yang menghalangi anak-anak yang stunting untuk melanjutkan pendidikan.

5. Kecerdasan Produktivitas dan Kapasitas Kerja yang Optimal: Stunting dapat memengaruhi kecerdasan produktivitas dan kapasitas kerja, meningkatkan beban negara.²¹



²¹ PUSTAKA RDS (Respiratory Distress Syndrome)', 2016, pp. 1–23
[mm.ac.id/91413/3/BAB II.pdf](http://mm.ac.id/91413/3/BAB%20II.pdf)>.

Dalam upaya penurunan stunting di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dalam jangka waktu lima tahun. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini juga dapat dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengonsumsi jenis makanan yang beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta mendorong para ibu untuk selalu mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;
6. Melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbauan IDAI.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk pengobatan stunting jika anak sudah terdiagnosis menderita stunting adalah sebagai berikut:

1. Melakukan terapi awal seperti memberikan asupan makanan yang bernutrisi



2. Suplementasi tambahan berupa vitamin A, Zinc, zat besi, kalsium dan yodium;
3. Edukasi dan pemahaman kepada keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih dengan menjaga sanitasi serta kebersihan lingkungan tempat tinggal.

Dalam menanganinya pemerintah bisa menangani stunting dalam 2 cara yaitu Intervensi sensitif dan intervensi khusus:

1) Intervensi Gizi Spesifik:

Intervensi gizi spesifik dimaksudkan untuk membantu anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yang menyumbang 30% penurunan tingkat stunting. Metode intervensi gizi khusus biasanya digunakan pada bidang perawatan kesehatan. Selain itu, intervensi ini tidak berlangsung lama, hasilnya dapat dicatat dalam waktu yang relatif singkat. Perbaikan Gizi Khusus Intervensi gizi khusus bertujuan untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara langsung dan umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Termasuk imunisasi ibu hamil dan PMT untuk balita di lokasi posyandu. Contoh bentuk dari kegiatan Intervensi Gizi Sensitif antara lain:

- Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita yang Malnutrisi,
- Suplemen Vitamin A untuk Balita,
- Fortifikasi Pangan dengan Mikronutrien Esensial (seperti penambahan zat besi pada tepung terigu),
- Tablet Tambah Darah (TTD) untuk Ibu Hamil,
- Program ASI Eksklusif hingga 6 Bulan,



• Penambahan Zinc dan Oralit untuk Anak yang Mengalami Diare,
• Penambahan Asam Folat untuk Ibu Hamil.

2) Intervensi sensitive

Intervensi Sensitive adalah berbagai upaya pembangunan yang dilakukan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum. Intervensi gizi yang sensitif merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di luar sektor kesehatan dan bertanggung jawab atas 70% intervensi stunting. Hal ini juga menjadi bagian dari rencana UNICEF untuk menangani masalah gizi di antaranya adalah melalui program untuk mengakhiri kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, partisipasi dunia usaha, pengendalian konflik dan pelestarian lingkungan²². Beberapa contohnya antara lain :

- Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi
- Pertanian Rumah Tangga untuk Diversifikasi Pangan
- Program Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga untuk Pemberdayaan Perempuan
- Program Sekolah Sehat untuk Meningkatkan Pendidikan Gizi
- Perbaikan Sistem Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil
- Kampanye Kebersihan Komunitas
- Memberikan Dukungan Psikososial kepada Ibu Hamil dan Menyusui di Wilayah yang Rentan.



and Tahar Rachman, 'Teori Stunting', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 18), pp. 10–27 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case->

2.4 Penanganan Stunting dalam Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Setelah strategi dibuat, langkah-langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah Kabupaten Enrekang selama lima tahun mendatang disusun. Arah kebijakan, menurut Permendagri No. 86 tahun 2017, merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan mengantisipasi masalah strategis untuk Daerah atau Perangkat Daerah. Isu-isu ini dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Enrekang berfungsi sebagai pedoman untuk menetapkan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan untuk mencapai sasaran RPJMD. Tahapan dan prioritas ini ditetapkan untuk mencerminkan masalah dan masalah strategis yang harus diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Fokus tema prioritas arah kebijakan berbeda-beda pada setiap tahapan, tetapi semuanya konsisten dalam rangka mensinergikan pencapaian sasaran lima tahunan RPJMD. Ini tidak berarti bahwa program atau kegiatan pembangunan operasional SKPD yang tidak diprioritaskan tidak berjalan; mereka tetap berjalan, tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah daripada yang diprioritaskan. Untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan, kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksudkan untuk mencakup program operasional untuk semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah.



Gambar 2.2 Stunting dalam RPJMD Kabupaten Enrekang

No	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2017/2018)	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqwa										
		Tujuan 2.1. Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,44	71,94	72,34	72,84	73,24	73,74	73,74
4		Sasaran 2.1.1. Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka Usia harapan hidup (tahun)	70,38	70,42	70,47	70,52	70,57	70,62	70,62
5		Sasaran 2.1.2. Menurunnya angka stunting	Persentase stunting	45,8	40,6	35,6	30,6	25,5	19,5	19,5
6		Sasaran 2.1.3. Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,76	13,86	13,96	14,06	14,16	14,26	14,26

Sumber : Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Enrekang 2018-2023

Stunting yang merupakan salah-satu isu strategis nasional dan kabupaten, dicantumkan pada RPJMD Kabupaten Enrekang tepatnya pada Misi 2 yaitu “Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqwa” yang menjadi sasaran salah-satunya adalah Menurunnya angka stunting. Sebagai implmentasi dari arah kebijakan tersebut dibuatlah beberapa kebijakan diantaranya:

2.4.1 Stunting dalam SK Bupati Enrekang No 141/KEP/III/2022

Keputusan Bupati Enrekang Nomor 141/KEP/III/2022 yang menetapkan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Tingkat Stunting (TPPS) di Kabupaten Enrekang²³. TPPS sendiri adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi



atara, A. S., Nurlinda.

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Adapun yang menjadi tugasnya antara lain :

- a) Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten.
- b) Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting.
- c) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten.
- d) Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan.
- e) Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
- f) Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Kelurahan, dan



Menyampaikan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada
setiap orang tua terdampak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu
jika diperlukan

TPPS di Kabupaten Enrekang memiliki Struktur yang terdiri antara lain atas :

- a) Pengarah: Bupati Enrekang, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 1419, Kepala Kejaksaan Negeri
- b) Pelaksana: Wakil Bupati Enrekang, Sekretaris Daerah, Kepala Bappelitbangda, Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c) Bidang Intervensi Stunting, Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan, Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management, serta Sekretariat Pelaksana

2.4.2 Stunting dalam PERBUP Enrekang No 56 Tahun 2023

Peraturan Kabupaten Enrekang No 56 Tahun 2023 yang mengatur terkait kewenangan Desa Dalam percepatan Penurunan Angka Stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa, yang selanjutnya disingkat TPPS Desa adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting di Desa yang bertugas pada operasional data, pergerakan dan pendampingan keluarga, dan mengkoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh TPK, merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan. Adapun untuk keanggotaan TPPS Desa antara lain:



a kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;

- b) Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- c) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- d) Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan / atau Sub-PPKBD/KPM, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian maka berikut ini dijelaskan mengenai studi-studi terdahulu, tindakan berisi mengenai hasil penelitian terdahulu, tindakan penelitian yang sama dan pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain dari itu, hasil penelitian terdahulu juga membantu menjadi bahan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Penelitian dan Judul	Teori	Intisari
1	Agung Rheza Fauzi, Amy Yayuk Sri Rahayu (2019) "COLLABORATIVE GOVERNANCE PENANGANAN HIV AIDS DI PROVINSI KARTASURA"	Collaborative Governance menurut Emerson dan Nabatchi (2015)	Collaborative governance pada pencegahan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta secara umum sudah memenuhi konsep dinamika kolaborasi Emerson dan Nabatchi (2015). Namun, terdapat temuan penelitian yang membedakan antara konsep dan proses collaborative governance



			<p>pengecegan HIV AIDS antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Unsur determinasi atau hasil kesepakatan 43indaka yang difasilitasi dalam pertemuan formil masih terbatas, pertemuan lebih banyak membahas mengenai teknis program kegiatan pencegahan HIV AIDS</p>
2	<p>Nadia Khumairatun Nisa, Hertanto, Ari Darmastuti & Pitojo Budiono (2023) "Collaborative Governance Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung"</p>	<p>Teori perspektif Collaborative Governance Proses Kolaborasi Emerson et al., (2012)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian penanganan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung dengan Perspektif Collaborative Governance menurut Emerson et al., (2012) yakni dinamika kolaborasi, 43indakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi kolaborasi dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal ini</p>



			<p>dapat dilihat dari tiga komponen kolaborasi yang terlaksana hanya pada 44indakan kolaborasi meliputi 44indakan pengaduan, 44indakan 44inda, dan 44indakan penyerahan meskipun demikian pelaksanaan tersebut tidak di dahului oleh dinamika kolaborasi yang baik. Adapun komponen dinamika kolaborasi tidak terlaksana dengan baik serta Dampak dan adaptasi kolaborasi cenderung didominasi oleh hasil 44indakan sehingga belum ada adaptasi yang dilakukan oleh 44inda kolaborasi.</p>
3	<p>Ipan , Hanny Purnamasari , Evi Priyanti (2021) “Collaborative governance dalam anan stunting”</p>	<p>Teori Collaborative Ansell dan Gash, (2007: 557)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam penanganan stunting di UPTD Puskesmas Ciampel sudah berjalan dengan cukup baik. Hal itu ditandai dengan adanya</p>



	(Studi Kasus : UPTD Puskesmas Ciampel)		keterlibatan dari sektor swasta dan 45indakan4545. Meskipun keterlibatan 45indakan4545 masih kurang aktif, namun sejauh ini 45indakan4545 menerima secara positif program-program yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai bentuk 45inda dalam penanganan stunting
4	Sukanti dan Nur Faidati (2021) "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN SLEMAN"	Teori Collaborative Ansell dan Gash,(2008)	Implementasi kolaborasi dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kolaborasi yang berjalan telah memenuhi prinsip dari dinamika collaborative governance yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi 45indaka, dan kapasitas aksi 45indaka.



Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sehingga menjadi kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan tindakan proses kolaborasi menurut Teori ahli Emerson, Nabatchi, & Balogh yang menggunakan berbagai komponen dalam proses kolaborasi diantaranya adalah 1) dinamika kolaborasi, 2) tindakan-tindakan kolaborasi, dan 3) dampak sementara serta adaptasi dari proses kolaborasi yang man di dalamnya memiliki beberpa komponen perincian sehingga dapat mengungkap fenomena kolaborasi. Teori ini diambil karena peneliti menganggap teori ini tepat dalam menjelaskan, menganalisis serta memberikan wawasan baru terhadap pelaksanaan proses kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang. Adapun tujuan dari penelitian yaitu peneliti hendak mengetahui sejauhmana pelaksanaan proses kolaborasi dalam penanganan stunting di Kabupaten Enrekang..

2.6 Kerangka Berpikir

Emerson dan Nabatchi (2015) memberikan definisi Collaborative Governance lebih luas lagi, yaitu tata kelola kolaboratif merupakan suatu proses dan struktur perumusan kebijakan publik, pengambilan keputusan dan manajemen publik yang melibatkan masyarakat dan badan publik, tingkatan pemerintah, swasta, dan ranah publik untuk mencapai tujuan publik (kesejahteraan) yang belum terselesaikan. Framework collaborative Governance memiliki berbagai dimensi, yaitu system context, Collaborative Regime (CGR), dan dinamika kolaborasi seperti yang tergambar



gka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada Emerson, Nabatchi, & Balogh yang menggunakan berbagai komponen

dalam proses kolaborasi diantaranya adalah 1) dinamika kolaborasi, 2) tindakan-tindakan kolaborasi, dan 3) dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi sehingga dapat mengungkap fenomena kolaborasi. Berikut ini kerangka berpikir yang digunakan:

